BAB IV

PEMIKIRAN MAHBUB DJUNAIDI TENTANG KHITTAH PLUS NU TAHUN 1987

A. Latar Belakang Pemikiran Mahbub Djunaidi Tentang Khittah Plus NU

Pemikiran Mahbub Djunaidi yang menjadi pembahasan penting dalam Konbes 15-18 Nopember 1987 di Cilacap menuai pro dan kontra dikalangan NU. Dukungan terhadap Khittah Plus datang dari politisi NU yang menginginkan kembali terjun kedalam masalah politik praktis. Sedangkan kubu yang menolak adalah para tokoh NU yang ingin mengembalikan NU ke garis perjuangan dengan keputusan Khittah 1926 karena pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh NU selama menjadi partai politik.

Latar belakang pemikiran Mahbub Djunaidi tentang Khittah Plus ini muncul ketika melihat keputusan muktamar NU di situbondo yang menginginkan NU melepaskan keterkaitan dari dunia politik secara organisatoris. Mahbub Djunaidi beranggapan bahwa politik adalah jalan yang efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Karena melihat definisi politik secara singkat adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. [66]

Selain ketidak setujuan Mahbub terhadap hasil keputusan Khittah NU 1926 pada Muktamar Situbondo, adapula beberapa hal yang melatar belakangi

[66]Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munculnya pemikiran Mahbub tentang Khittah Plus atau Politisasi NU. Diantaranya adalah:

1. Tetap Terlibatnya Para Tokoh NU Dalam Urusan Politik Pasca Khittah NU

NU memang tidak bisa dipisahkan dengan urusan politik, karena memang sejak tahun 1952 NU yang mengganti baju dari jam'iyah keagamaan menjadi sebuah partai politik. Budaya politik sudah mengakar kuat dalam tubuh NU dan para tokoh-tokohnya. Tahun 1984 menjadi momentum yang penting oleh NU karena mengembalikan jamiyah NU ke garis perjuangan yang disebut Khittah NU 1926.

Dalam keputusan Khittah NU 1926 yang dideklarasikan di Muktamar Situbondo adalah meninggalkan politik praktis secara organisatoris dan tidak terikat dengan partai politik manapun. Hal tersebut juga dipertegas dengan adanya Surat Keputusan dari PBNU tahun 1985 yang isinya melarang pengurus harian NU merangkap jabatan di partai politik.[67]

Meski sudah ada rambu-rambu larangan untuk merangkap jabatan tetapi masih kalah dengan keinginan para tokoh NU untuk tetap berpolitik. Banyak tokoh-tokoh NU yang dalam struktural masuk dalam pengurusan NU juga masih masuk dalam jajaran kepengurusan partai politik, utamanya di PPP. Seperti H. Imron Rosyadi, H. Imam Afwan, Kiai Syansuri Badawi dan beberapa tokoh NU lainnya.[68]

---

[67]Lihat BAB III Halaman 41-42
[68]Marijan, *Quo Vadis NU*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk tetap menjaga kenetralan politik yang dipegang oleh NU pasca Khittah 1926 dilakukanlah aksi penggembosan di wilayah yang basis NU-nya sangat besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang dilakukan oleh H. Mahbub Djunaedi, H. M. Yusuf Hasyim, H. Syafii Sulaiman, KH. Sohib Bisri, H. Hasyim Latief, KH. Imron Hamzah dan beberapa nama kiai lainnya.[69] Dengan tujuan untuk meyakinkan pemerintah bahwa NU sudah benar-benar netral dan sudah tidak ada kaitannya dengan PPP

Aksi penggembosan terhadap PPP justru mengutungkan partai Golkar da PDI. Dalam kajian *Bahtsul Massail* yang dilakukan oleh para tokoh NU se-DIY sangat menguntungkan partai Golkar karena dirasa mampu paling mampu membawa manfaat bagi bangsa dan umat islam di Idonesia.

Sampai akhirnya adapula fatwa-fatwa para Kiai yang mengharamkan memilih PPP dalam pemilu melalui pengajian-pengajian ataupun selebaran. Hal itu mengakibatkan perpecahan dalam tubuh NU karena NU yang menyataan diri netral dari partai politik manapun malah melakuan aksi penggembosan dan malah mendukung Golkar. Memang budaya politik di NU uda mengakar kuat, meskipun adanya Khittah NU 1926dan beberapa peraturan teta saja para tokoh NU masih menginginkan untuk terus berpolitik.

2. NU Hanya Dijadikan Alat untuk Mendulang Suara

Kebebasan warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke partai politik yang diinginkan ternyata malah menimbulkan kegamangan politik. Hal itu tentu diakibatkan oleh fatwa-fatwa yang di lontarkan para tokoh NU dalam

[69]Ibid., 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya mengurangi dan menambahi suara untuk partai politik tertentu. Keadaan telah melanggar hak berpolitik bagi warga NU yaitu:

1. Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Tetapi Nahdlatul Ulama bukanlah wadah kegiatan berpolitik praktis. Penggunaan hak berpolitik harus dilakukan menurut peraturan perundangan, sehingga tercipta budaya politik yang sehat.
2. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama:
   a. Menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik dan bersungguh-sungguh.
   b. Memberikan kebebasan penuh kepada warganya untuk masuk atau tidak masuk suatu organisasi politik yang manapun dan menyalurkan aspirasi politik melalui organisasi politik pilihannya itu, selama dipandang bermanfaat dan tidak merugikan Islam dan perjuangan umat Islam.[70]

Kebebasan memilih warga NU masih disetir oleh para tokoh yang masih terlibat dalam dunia politik. NU yang memiliki basis masa terbesar di Indonesia dalam setiap pemilu hanya dijadikan alat untuk mendulang suara. Nu hanya dijadikan tarik-ulur oleh partai-partai politik guna mendapatkan masa dan dukungan oleh NU engan berbagai iming-iming jabatan dan kesejahteraan.

Mahbub menjelaskan, ia tidak bisa membayangkan warga NU yang sekitar 20 jutaan pada tiap pemilu hanya berdiri di luar pagar dan cukup terbatas

[70]Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad SiddiqTentang: Aqidah,Syariah dan Tasawuf, Khittah NU 1926, Hubungan Pancasila dan Negara, Negara Kesatuan RI Bentuk Final, Watak Sosial Ahlussunah, Seni dan Agama* (Jakarta: Duta Aksara Mulia.2010). 68-69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paa tukang beri suara. Mahbub merasa yakin masih banyak warga NU yang menginginkan ormas keagamaan ini menjadi parpol lagi jika keadaan memungkinkan.[71]

Hal yang serupa juga oleh Mahbub Djunaidi di tulis dalam majalah tempo ketika berdialog dengan Cholid Mawardi yang waktu itu di isukan menjadi ketua umum PPP, yang isinya:

> " Andai kata betul anda jadi ketua umum PPP, apa bukan maksudnya supaya warga NU kembali mendukung partai yang sudah keropos karena digembosi itu? Kedengarannya kok jadi lucu dan tidak etis. Apa ini bukan berarti menjilat ludah kembali? Taruhlah itu cuma orang-orang NU secara pribadi, sedangkan NU sendiri tetap sebagai ormas nonpolitik tidak kesana dan tidak kesini. Tapi, bukankah masih juga kocak: siang jadi PPP, dan malamnya jadi NU? Apa bukan membingungkan orang NU kepalanya jadi dua? Bersikap ganda dan ambivalen terus menerus pastilah kurang bagus untuk pencernaan, bisa bikin mencret
>
> Dari pada NU sekarang ini melayang-layang diluar sistem politik resmi, bagaimana kalau kembali saja jadi partai politik lagi? Apa bukan lebih baik begitu daripada tiap pemilu jadi perawan yang ditarik kian kemari oleh para kontestan? Orang tentu bisa juga bilang NU itu menjilat ludahnya kembali. Bagaimana kalau mnggunakan kalimat yang lebih halus: NU senantiasa melakukan *Think and Rethink.*"[72]

Dari ketidakjelasan sikap NU dalam menyalurkan aspirasi politiknya yang membuat NU hanya dijadikan alat untuk mendulang suara bagi partai yang berhasil menarik hati tokoh NU dan Warganya, hal inilah yang membuat Mahbub Djunaidi mempunyai gagasan Khittah Plus yang dijelaskan dalam Konbes/Munas di cilacap sebagai pembahasan utama.

3. Politik Adalah Satu-satunya Cara Mencapai Tujuan

[71]"NU Tetap Berpegang pada Hasil Muktamar Situbondo", *Amanat Hati Nurani Rakyat*, XII.
[72]Mahbub Djunaidi, "KhittahPlus",*Tempo* (7 November 1987).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahbub Djunaidi dan politik memang tidak bisa dipisahkan, karena dari ayahnya H. Djunaidi yang pernah berjuang dalam bidang politik dengan menempati posisi sebagai DPR hasil pemilu 1955. Sedangkan Mahbub Djunaidi juga merupakan seorang politik yang pernah menjadi DPR-GR/MPRS dari fraksi NU tahun 1960 dan dari fraksi PPP tahun 1977.

Menurut Mahbub kondisi masyarakat muslim di indonesia dalam pelaksanaan syariat keagamaan dapat dikatakan menggembirakan, namun dari sikap politik masih memprihatinkan. Inilah yang menurut Mahbub salah satu kekurangan umat Islam di Indonesia. Sekarang ini, tidak ada satupun organisasi Islam yang terang-terangan membenderakan dirinya sebagai partai politik Islam. Dengan keadaan seperti ini, sangat kecil kemungkinan aspirasi politik Islam tersalurkan.[73]

Ketika NU ikut dalam politik praktis, NU sudah menjadi langganan untuk duduk di kementerian dan ikut mempengaruhi keputusan pemerintahan. Seperti KH. Abdul Wahid hasyim sebagai menteri agama pertama, kemudian ada nama KH. Masykur, Fahrurrahman Kafrawi, Saifuddin Zuhri dan tokoh lain yang masuk dalam kementerian. Dalam perkembangannya pada 9 April 1957 presiden Soekarno membentuk kabinet yang bernama kabinet karya, dengan Ir. Djuanda sebagai perdana menteri, Mr. Hardi, Idham Chalid, dan Leimena masing-masing menjadi wakil perdana menteri I, II dan III. Selain Idham Chalid, dari partai NU juga ditunjuk KH. M. Ilyas sebagai menteri agama, Mr. Sunaryo sebagai menteri agraria, Prof. Drs. Sunaryo sebagai menteri perdagangan.

[73]Mahbub Djunaidi, "Saya Setuju Kalau NU Berpolitik", Majalah Hikmah(September 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian kabinet karya inipun mengalami perubahan, yakni tambahan KH. M. Wahib Wahab sebagai menteri urusan kerjasama sipil-militer dan Prof. Drs. Sunaryo diangkat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Brazilia, sedangkan jabatan semula digantikan oleh Rahmat Mulyoamiseno.[74]

Pada tahun 1966, NU masih memegang peranan penting dalam pemerintahan dengn terpilihnya Subhan ZE sebagai wakil ketua MPRS (1966-1971) dan A. Sjaichu sebagai ketua DPR-GR. Perjuangan NU masih berlanjut dalam bidang politik. Banyak politisi NU yang berhasil menduduki kursi pemerintahan.

Keterlibatan tokoh NU yang berjuang di arena politik dengan mempertahankan posisi trategis dalam pemerintahan bertujuan untuk memudahkan jalan NU dan memperjuangkan kepentingan NU dalam pemerintahan dengan menjalin komunikasi yang kuat bukan hanya dari kalangan ulama saja, melainkan dari semua kalangan.

Dengan terus terlibatnya NU dalam pemerintahan, cita-cita NU dan umat Islam akan memudahkan untuk mencapai tujuan karena menurut Mahbub Djunaidi politik merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan. Tanpa harus dibatasi oleh keputusan Khittah NU 1926 yang melarang untuk ikut berpolitik praktis.

B. Pemikiran Mahbub Djunaidi Tentang Khittah Plus NU

Adanya keputusan Khittah NU menimbulkan banyak penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan sesuka hati, ada yang menganggap bahwa Khittah NU

[74]Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan penarikan diri dan meninggalkan segala macam politik. Adapula yang menafsirkan bahwa adanya Khittah adalah langkah melepaskan diri dari PPP dan berganti memberikan dukungan partai dengan alasan kekecewaan terhadap PPP.

Pengertian Khittah yang sebenarnya disebutkan dalam keputusan Muktamar XXVII NU No.:02/MNU-27/1984, yang isinya:

a. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yag harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
b. Landasan tersebut adalah faham Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah* yang diterapkan menurut kondisi masyarakat di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
c. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.[75]

Setelah Muktamar ke 27 di Situbondo merupakan langkah awal untuk meninggalkan segala macam politik praktis dan menyatakan netral dari golongan partai politik manapun. Intinya secara organisatoris NU tidak terikat dengan partai politik tetapi secara perseorangan boleh melakukan praktik politik untuk mendukung salah satu partai yang sesuai. Misalnya saja dalam soal perangkapan jabatan, Muktamar menyerukan: Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas organisasi,

[75]Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Prespektif Sejarah dan Ajaran (Refleksi 65 Th. Ikut NU)* (Surabaya: Khalista. 2006), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama tidak dirangkap dengan kepengurusan harian organisasi politik manapun.[76]

Meskipun sudah ada larangan perangkapan jabatan dalam NU dan patai politik dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan PBNU No. 01/PBNU/I-1985. Tetap saja banyak tokoh elit NU yang tetap duduk di PPP seperti, H. Imron Rosadi, H. Imam Sofwan, Kiai Syansur Badawi dan tokoh-tokoh lainnya. Hal ini menandakan bahwa syahwat politik warga NU masih kuat meski sudah ada "Rambu-rambu" tentang Khittah NU 1926.

Ketika NU dalam upaya pemantapan Khittah NU dan mengatasi permasalahan yang timbul setelah adanya Khittah NU, muncul pula gagasan agar NU kembali berpolitik praktis, gagasan tersebut dikemukakan oleh H. Mahbub Djunaidi yang lebih dikenal dengan istilah "Khittah Plus". Isu ini muncul menjelang dilaksanakannya Munas Alim Ulama di pondok pesantren Ihya' Ulummudin Kesugihan, Cilacap, 15-18 Nopember 1987.

Ide yang dilontarkan Mahbub merupakan ketidaksetujuan terhadap hasil Muktamar NU ke 27 di Situbondo tentang kembali ke Khittah dan meninggalkan segala macam politik praktis. Pada prinsipnya H. Mahbub djunaidi menginginkan adanya koreksi terhadap hasil-hasil Muktamar NU di Situbondo tahun 1984, yang memutuskan kembalinya NU ke Khittah 1926, berarti melepaskan diri dari urusan

[76]Marijan, *Quo Vadis NU*, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik praktis dan hanya mengkhususkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan.[77]

Kacung marijan dalam bukunya menyebutkan dasar pikiran Mahbub adalah karena NU memiliki anggota yang relatif besar, sekitar 20 juta. Karena itu semestinya NU tidak bisa berdiri di luar pagar dan cukup terbatas dengan hanya tukang memberi suara saja.[78] Dengan anggota yang banyak dan politisi NU yang sudah memiliki banyak pengalaman memungkinkan NU untuk kembali menjadi partai politik atau setidaknya mendukung salah satu partai yang bisa menampung aspirasi warga NU.

Mahbub Djunaidi mengungkapkan idenya tentang Khittah Plus tersebut dalam majalah yang isinya sebagai berikut:

> "Apa pikiran NU kembali jadi partai itu sebuah penyimpangan mendasar dari Khittah 1926? Tidak perlu begitu. Taruhlah sekadar "Khittah Plus". Toh asal mula Khittah tak lebih dan tak kurang dari kekecewaan terhadap pimpinan NU periode sebelum Muktamar situbondo yang dianggap mengabaikan urusan pendidikn dan sosial yang ditambah dengan rasa sakit hati terhadap perlakuan PPP"[79]

Khittah Plus merupakan pemikiran yang kontroversial dikalangan NU. Pemikiran dari Mahbub Djunaedi ini berusaha ditentang oleh bebrapa ulama seperti KH. Ahmad Shiddiq dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena akan mempengaruhi proses kembalinya NU ke Khittah NU 1926. Khittah Plus muncul sebagai pewarna dari perjalanan panjang NU dalam urusan politik. Karena kurun

---

[77]Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah, Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Media Widya Mandala. 1992), 139.
[78]Marijan, *Quo Vadis NU*, 180.
[79]Mahbub Djunaidi, "KhittahPlus", *Tempo* (7 November 1987), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang panjang pula objektifitas pemikiran tentang Khittah Plus malah sering digunakan dalam urusan politik warga NU.

Mahbub Djunaidi sadar bahwa mengembalikan NU menjadi partai politik memang sulit, apalagi dengan adanya benturan dengan para kiai. Tetapi, Mahbub yakin sesuatu yang sulit belum tentu Mustahil untuk terjadi dengan melihat perkembangan sistem politik di Indonesia. Karena ketika NU tidak mengambil sikap antara berhenti dari politik praktis secara organisatoris atau sebaliknya NU akan dijadikan tarik ulur untuk menjulang suara bagi partai yang ikut dalam pemilu.

Lebih lanjut Mahbub menjelaskan dalam majalah Tempo bahwa keputusan Khittah NU tidak selamanya bersifat objektif dan memiliki sifat dinamis, yang isinya sebagai berikut:

> Apa yang objektif benar diputuskan Muktamar Situbondo tahun 1984 belum tentu objektif benar untuk selama-lamanya? Bukankah mobilitas masyarakat perlu diperhitungkan? Bukankah *Status Quo* sesuatu yang tidak permanen? Bilamana kondisi obyektif berubah, bukankah boleh-boleh saja NU sendiri melakukan peruahan terhadap pendapatnya sendiri yang pernah dikeluarkan? Bukankah di bidang hukum ada *Qoul Qodim* dan *Qoul Jadid*? Apa bukan begitu itu yang namanya dinamis?[80]

Mahbub membandingkan keadaan pasca Khittah NU dengan era tahun 1960-an dan 1970-an, ketika NU masih berdiri menjadi partai. Massa NU begitu besar, menguasai dimana-mana, keanggotaan Nu tidak hanya terdiri dari kaum Ulama saja, tetapi juga meliputi para guru, pejabat pemerintahan, nelayan, seniman, bahkan olahragawan. Kesemuanya itu membuat barisan Nahdlatul Ulama menjadi sangat panjang dengan medan perjuangan yang otomatis menjadi sangat luas.

[80]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mahbub, meskipun NU berbentuk partai politik, urusan-urusan seperti pendidikan (*Maarif*), sosial (*Mabarrot*), dakwah dan muammalah tetap memperoleh porsi perhatian yang tak kalah besar.[81]

Berlangsungnya Konbes Cilacap tahun 1987, Khittah Plus merupakan topik utama dalam pembahasan. Khittah Plus sendiri sebenarnya mendapatkan banyak dukungan dari para politisi dan tokoh muda NU yang menginginkan sebuah kejayaan sewaktu menjadi partai politik dan keinginan untuk bisa berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain pembahasan tentang Khittah Plus NU adapula pembahasan untuk menggulingkan kepemimpinan Abdurrahman Wahid dengan digantikan Yusuf Hasyim. Poitisi NU yang mendukung Khittah Plus atau Politisasi NU menganggap ketika Abdurrahman Wahid lengser akan membawa NU kembali ke jalur politik dan bahkan akan menjadi partai politik. Upaya menggulingkan ini dilakukan oleh para politisi NU dengan berbagai alasan terutama masalah model kepemimpinan dan usia yang terlalu muda untuk memimpin NU.

Upaya untuk menggulingkan Abdurrahman Wahid dalam Konbes Cilacap tidak berhasil karena memang tidak dibenarkan dalam AD/ART. Dukungan dari Rois Aam PBNU KH. Achmad Siddiq juga sangat berpengaruh karena berhasil meyakinkah warga NU bahwa Abdurrahman Wahid masih bisa dan mampu untuk terus memimpin NU. KH. Achmad Shiddiq juga berhasil menggagalkan politisasi NU (keinginan untuk terus menggeluti urusan politik) dengan tetap konsisten dengan keputusan muktamar Situbondo.

[81]Mahbub Djunaedi,"Saya Setuju Kalau NU Berpolitik", *Majalah Hikmah* (September 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KH. Achmad Siddiq beserta orang-orang yang setuju dengan “depolitisasi NU (setuju NU melepaskan diri dari kegiatan politik) telah berhasil menggagalkan upaya kelompok yang menginginkan politisasi NU, kelompok depolitisasi NU bertekad bulat untuk mengamankan keputusan Muktamar Situbondo dan tetap mempertahankan Abdurrahman sebagai Ketua Umum PBNU.[82]

Kharisma yang dimiliki KH. Achmad Siddiq sebagai Rais Aam PBNU dan Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU sekaligus cucu dari pendiri NU sangat luar biasa dengan berhasil mempertahankan Khittah NU 1926. Meski sempat memanas akhirnya keinginan Mahbub untuk menjadikan NU sebagai partai politik harus gugur. Selain karena berbenturan terhadap para tokoh NU sendiri pemikiran Mahbub tersebut juga berbenturan dengan undang-undang partai politik yang hanya membolehkan dua partai dan Golkar.

Akhirnya dalam konbes itu juga ditegaskan, dengan adanya keputusan itu PBNU menganggap selesai persoalan perbedaan pandangan yang ada. Selanjutnya dalam melaksanakan tanggung jawabnya, PBNU akan selalu berpedoman kepada keputusan-keputusan formal organisasi sebagaimana dihasilkan Muktamar NU 1984 dan Munas/Konbes NU !987.[83]

Meskipun demikian, setelah berakhirnya Konbes Cilacap, tidak ada perasaan benci satu dengan yang lainnya. Abdurrahman wahid meenghargai pendapat Mahbub dan menyadari terkait perbedaan pendapat yang muncul.

---

[82]Fathoni dan Zen, *NU Pasca Khittah, Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, 144.
[83]“NU Tetap Berpegang pada Hasil Muktamar Situbondo”, *Amanat Hati Nurani Rakyat* (Kamis, 19 November 1987), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya keputusan untuk tetap mempertahankan hasil Muktamar Situbondo dapat diterima dengan lapangdada oleh masyarakat NU tanpa adanya perpecahan.

C. Dampak Pemikiran Mahbub Djunaidi Tentang Khittah Plus Dalam Tubuh NU

Perjalanan NU memang tidak pernah bisa dipisahkan dari politik. Mulai dari awal kelahiran NU sampai saat ini. Politik bagi warga NU merupakan sebuah tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Hal itu karena dari awal NU yang dianggap dari kalangan tradisionalis dan berangkat dari pesantren yang dianggap hanya mampu sebagai "guru ngaji", NU ingin membuktikan bahwa NU mampu untuk ikut berpolitik dan agar tetap diakui keberadaanya oleh pemerintah. Bahkan tokoh penting dalam jajaran NU, KH. Wahab Hasbullah mempunyai pendirian bahwa melalui politik bisa melindungi dan menjamin baik kepentingan NU maupun umat Islam pada umumnya.

Setelah NU melaksanankan Muktamar ke 27 disitubondo yang menghasilkan keputusan NU kembali ke Khittah 1926 merupakan langkah awal NU untuk lepas dari politik praktis yang pernah digeluti NU baik sebagai partai NU maupun di PPP. Berselang tiga tahun, tepatnya pada Konbes NU di Cilacap tahun 1987 muncul kembali pemikiran untuk NU kembali menjadi partai politik kembali, pemikiran ini muncul dari Mahbub Djunaidi yang sering disebut dengan Khitah Plus. Meskipun bisa dihalang-halangi oleh para kiai yang tetap menginginkan kembalinya NU ke Khittah 1926 dan berhasil mempertahankan keputusan Khittah NU 1926. Tetapi pemikiran Mahbub Djunaidi mempunyai dampak yang besar terhadap NU. Dampak yang terjadi adalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penegasan Identitas NU pasca Khittah 1926.

Pasca Khittah NU, muncul dua kubu yang saling bertentangan antara kelompok yang mendukung Khittah 1926 dan kubu politisi NU yang menginginkan NU tetap menjadi partai politik sendiri. NU yang menyatakan kenetralan politik terhadap partai politik manapun ternyata tidak terbukti. Aksi penggembosan di PPP dan menguntungkan partai Golkar dengan fatwa haram mencoblos PPP merupakan keterlibatan para Kiai NU yang masih menaruh dendam terhadap PPP khususnya kepada Naro.

Terjadinya perpecahan dalam NU yang terjadi membuat para pimpinan NU merasa terganggu dengan upaya tarik menarik terhadap makna Khittah. Pemahaman politik warga NU agaknya telah mengalami redefinisi, kalau sebelumnya lebih menjurus kepada keterlibatan secara organisatoris, didalam *power-game*, maka setelah kembali ke Khittah 1926 secara konsepsional politik Nu lebih diartikan sebagai keterlibatan organisasi ini dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.[84]

Upaya untuk mempertegas identitas NU pasca Khittah dan upaya menghentikan tarik menarik antara kedua kubu maka perlu adanya pedoman bagi warga NU untuk menggunakan hak-haknya dalam berpolitik yang dirumuskan pada Muktmar ke 28 di krapyak, Yogyakarta tahun 1989. Yang isinya adalah:

[84]Marijan, *Quo Vadis NU*,186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan dunia dan kehidupan di akhirat.
3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etikadan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran murni dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperoleh konsensus nasional, dan dilakukan sesuai dengan *akhlakqul karimah* sebagai pengalaman sejarah Islam Ahlussunah Waljama'ah.
7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalil apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
8. Perbedaan pandangan diantara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, *Tawadlu'* dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.[85]

Pedoman berpolitik yang disubutkan diatas memiliki arti bahwa tidak ada batasan bagi warga NU untuk berpolitik, karena dengan sikap netral akan memperluas jangkauan politik NU dan bebas untuk memilih dan masuk ke partai dalam pemilu yang dilaksanakan tanpa harus menjadi partai politik.

2. Membuka Peluang Politisi NU untuk Tetap Berpolitik Praktis

[85]Lihat *Keputusan Muktamar NU No. 06/MNU-28/1989/ Tentang Masalah-masalah Kemasyarakatan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebebasan warga NU dalam memilih dan masuk ke dalam partai politik, dan bahkan mendukung warganya aktif dalam organisasi politik membuat perpecahan dalam tubuh NU. Mahbub Djunaidi yang mempunyai gagasan Khittah Plus atau ingin menjadikan NU sebagai partai politi adalah sebagai satu-satunya aspirasi bagi warga NU.

Artikuslasi Khittah NU 1926 yang melarang warga NU untuk terlibat politik praktis secara organisatoris ternyata tidak sesuai dengan konsep. Pertama, masuknya KH. Abdurrahman Wahid yang menjadi MPR dan ketua umum PBNU dan Slamet Effendi Yusuf yang menjadi Departemen Pemuda DPP Golkar padahal ia adalah ketua GP-Ansor. Kedua, pada Muktamar PPP ke 2 berhasil menggulingkan Naro mengisi posisi strategis yakni H. Matori Abdul Djalil menjadi Sekjen dan beberapa politisi NU lainnya yang menjadi anggota.

Dengan banyaknya tokoh NU yang masuk kembali dalam jajaran PPP ada indikasi bahwa PPP akan menjalin hubungan lagi dengan NU dan bebrapa kali melakukan rekonsiliasi agar NU bisa mendukung PPP dalam pemilu 1992. Dalam hal ini, keterlibatan tokoh NU dalam melaksanakan politik masih menggunakan simbol NU yang dalam semboyan politik NU " NU tidak kemana-mana tapi NU ada dimana-mana", sudah menyalahi aturan.

Geliat politik NU dalam PPP terus berlanjut pada Muktamar PPP tahun 1994. Pada Muktamar tersebut sejumlah tokoh NU menyatakan dengan tegas ingin mengambil alih kepemimpinan di PPP. NU yang sudah terlepas dari PPP sejak Muktamar ke 27 di situbondo malah dengan getol dan semangat untuk mengisi formatur kepengurusan PPP dengan orang-orang NU. Secara sederhna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dua faktor yang menjadi alasan kenapa NU tergoda untuk tampil ke arena politik. *Pertma* menguatnya "Formalisme" dikalangan pergerakan Islam. Bagi NU pendukung Khittah, formalisme pandangan yang menganggap bahwa golongan Islam harus mempunyai wakil resmi dalam struktur politik dalam kepolitikan Islam adalah suatu *Set-back.* NU tampaknya prihatin dengan kecenderungan tersebut. *Kedua* sebagai organisasi masa Islam yang merasa pernah tampil dengan peringkat kedua pada pemilu 1971, NU tampaknya merasa "ditinggalkan" dalam pengelolaan isu di sekitar relasi Islam dan negara.[86]

Dengan adanya faktor tersebut menandakan bahwa memperjuangkan umat islam dalam jalur politik harus mempunyai wakil dalam pemerintahan hal serupa juga yang menjadikan landasan berfikir Mahbub Djunaidi dalam gagasannya mengenai Khittah Plus yang beranggapan bahwa dengan berpolitik adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan.

[86]Syamsuddin Haris,"Membaca Arah Politik NU". Dalam Sinarsari Ecip, *NU Khittah dan Godaan Politik* (Bandung: Mizan, 1994), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id